



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN**, maka untuk mempercepat terwujudnya tujuan tersebut diperlukan fokus pembangunan. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan yaitu **MENINGKATNYA KETAHANAN DAERAH TERHADAP BENCANA**, maka pemerintah daerah melalui BPBD diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penanggulangan bencana.

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, maka setiap Perangkat Daerah yang ada perlu menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal ini selain sebagai bentuk implementasi kepatuhan kepada pemerintah dan NKRI dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Pasal 1, angka 30 dimana Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah, juga sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi tindak lanjut riil pada RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena jalinan hubungan dan keterkaitan antara keseluruhan dokumen perencanaan yang ada tersebut saling bertautan dan saling mendukung satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen yang terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD.

Rencana Kerja atau disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu jenis Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

Renstra Perangkat Daerah dan RKP. (Pasal 1, angka 30; dan Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pada penyusunan Renja BPBD dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan

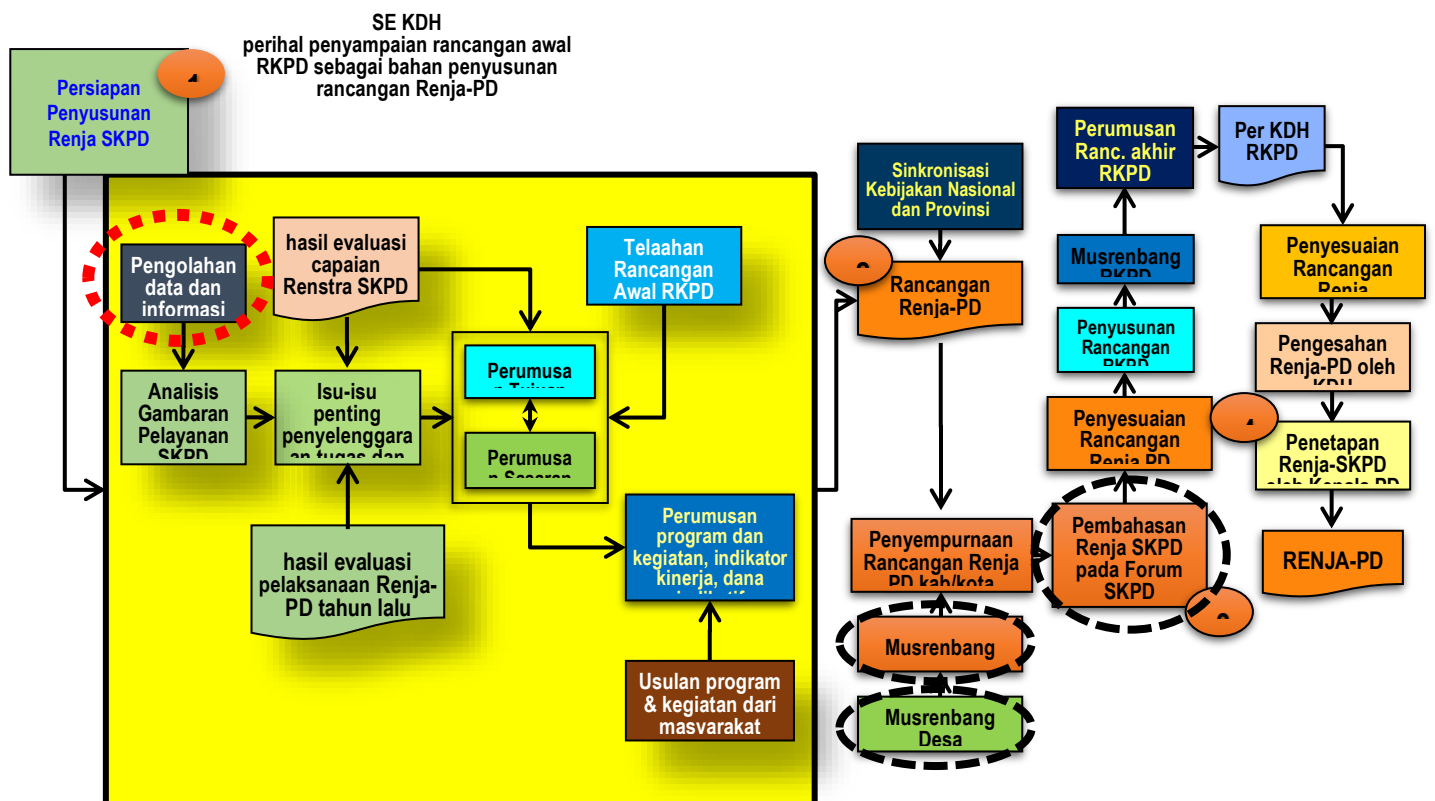
Untuk tatacara cara penyusunan renja sesuai dengan pasal 125 sampai dengan pasal 143 Permendagri 86 Tahun 2017 di bagi menjadi enam paragraf, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah;

Adapun titik berat Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD pada tahun 2026 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu dengan peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dengan kata lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya kepada masyarakat yang terdampak bencana secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel, maka Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 ini disusun sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD yang secara bertahap diharapkan dapat mendukung makin menguatnya kapasitas sebagai suatu lembaga, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana serta mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan bencana sesuai RPD tahun 2024-2026, mulai dari tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat serta pada tahap pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dengan demikian titik berat rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD Tahun 2026 yang berfokus pada upaya-upaya yang dapat mendukung pengurangan risiko bencana, ini nanti diharapkan sedapat mungkin juga bersinergi atau sinkron dengan Arah Kebijakan Strategis Nasional BNPB.



Bagan-1 Alur penyusunan RENJA Perangkat Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustaman Gender dalam Pemangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Pengarusutamaan Gender;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada satu tahun yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah:

- a. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- b. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2026;
- c. Sebagai rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai dari sumber APBD Tahun 2026 untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- d. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah :

- a. Dapat meningkatkan tertib administrasi kelembagaan (BPBD);
- b. Untuk penguatan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Masyarakat serta Lembaga Usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan semua pihak yang berkompeten dan terkait dengan penanggulangan bencana pada tiga tahapan penanggulangan bencana;

- e. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan bantuan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat bencana (banjir, longsor, angin puting beliung dan kekeringan);
- f. Meningkatkan percepatan pemulihan serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi daerah/ wilayah terdampak bencana, baik infrastruktur, sarana dan prasarana, serta permukiman warga masyarakat.
- g. Indikator masing-masing program dan kegiatan sesuai dengan output dan outcome, serta mendukung capaian kinerja yang ditetapkan;
- h. Rencana kebutuhan dan pengalokasian pagu anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Renja Tahun 2026 dapat dipersiapkan sejak dini oleh Pemerintah Kabupaten (DPKD);
- i. Kode rekening anggaran sinkron dan tepat dengan jenis program/ kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026, sehingga kesalahan dapat dihindari;
- j. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan menyeluruh;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

- seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
- Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yaitu ada 4 antara lain:

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, diawal Perjanjian Kinerja BPBD menentukan target sebesar 0,21% kemudian pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar 0,21%, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2024 sebesar 0,72% sehingga capaiannya sebesar 348%.
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, BPBD menentukan target 3,05%, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2024 sebesar 0,40% atau sebesar 13%.
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2024 sebesar 100%.
- 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana, BPBD menargetkan 100% pada Perjanjian Kinerja, realisasi dan capaian kinerja diakhir tahun 2024 sebesar 100%.
- 5) Pada tahun 2024 target nilai SAKIP sebesar 81,00 dan tercapai sebesar 81,50. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 100,3%.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2024) sebagai berikut : target tahun 2024 sebesar 0,745 tercapai 0,76. Capaian sesuai sehingga persentase capaian 102%, untuk tahun 2024 target nilai SAKIP sebesar 81,00 dan tercapai sebesar 81,50. Capaian sesuai target sehingga persentase capaian sebesar 100,3%.

Capaian pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 secara keseluruhan tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,44. Adapun realisasi kinerja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 tercapai anggaran sebesar 99,39% dan realisasi Rencana Kerja 2024 tercapai 100%, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 99.96% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD terealisasi anggaran sebesar 99.96% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 94,99% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi anggaran sebesar 94,93% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi anggaran sebesar 95,32% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD realisasi anggaran sebesar 95,15% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 97,80% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi anggaran sebesar 97,71% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar 99,75% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi anggaran sebesar 99,94% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi anggaran sebesar 97,52% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi anggaran sebesar 99,93% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi anggaran sebesar 99,77% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi anggaran sebesar 97,35% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu terealisasi anggaran sebesar 99,80% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi anggaran sebesar 99,98% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi anggaran sebesar 99,33% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi kinerja sebesar 0% dikarenakan tidak ada anggarannya;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran sebesar 99,33% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi anggaran sebesar 88,24% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi kinerja sebesar 100%;

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi anggaran sebesar 86,93% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi anggaran sebesar 99,52% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi anggaran sebesar 99,61% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi anggaran sebesar 98,47% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
2. Program Penanggulangan Bencana.

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana tahun 2023 tercapai anggaran sebesar 98,39% dan realisasi Rencana Kerja 2023 tercapai 100% dalam program, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 98,08% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 98,08% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terealisasi anggaran sebesar 98,94% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 98,56% dan tercapai kinerja sebesar 100%;

- 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 98,57% dan tercapai kinerja sebesar 100%;
 - 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99,91% dan tercapai kinerja sebesar 100%;
 - 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana realisasi anggaran sebesar 99,38% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 5) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 99,66% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 6) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan realisasi anggaran sebesar 99,29% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 98,78% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 8) Penyusunan Rencana Kontijensi terealisasi anggaran sebesar 98,12% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 9) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,65% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 10) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam terealisasi anggaran sebesar 99,35% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terealisasi anggaran sebesar 97,17% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota teralisasi anggaran sebesar 99,25% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 70,09% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran sebesar 99,23% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
 - 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 99,61% dan tercapai kinerja 100% dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi kinerja sebesar 100%;
- 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 3) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terealisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%.
- 6) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota terealisasi anggaran sebesar 99,61% dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Sebagai evaluasi, hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat dikatakan menunjukkan capaian kinerja yang baik. Sedangkan capaian kinerja pada tahun 2024 (sedang berjalan) nanti hasilnya juga diharapkan tercapai minimal sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu :

- a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target sebesar 0,21%.
- b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05 %.
- c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dengan target sebesar 100%.
- d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun dengan target sebesar 100%.

Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja TA 2024

Tahun anggaran 2024, BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Daerah/Kapasitas Penanggulangan Bencana;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target sebesar 0,745;
2. Nilai SAKIP target sebesar 81,50

Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan daerah/kapasitas penanggulangan bencana dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran :

➤ **Indeks Ketahanan Daerah**

Tujuan BPBD adalah Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %. Sedangkan Capaian tahun 2021 sebesar 0,72, Capaian tahun 2022 sebesar 0,73, Capaian tahun 2023 sebesar 0,74.

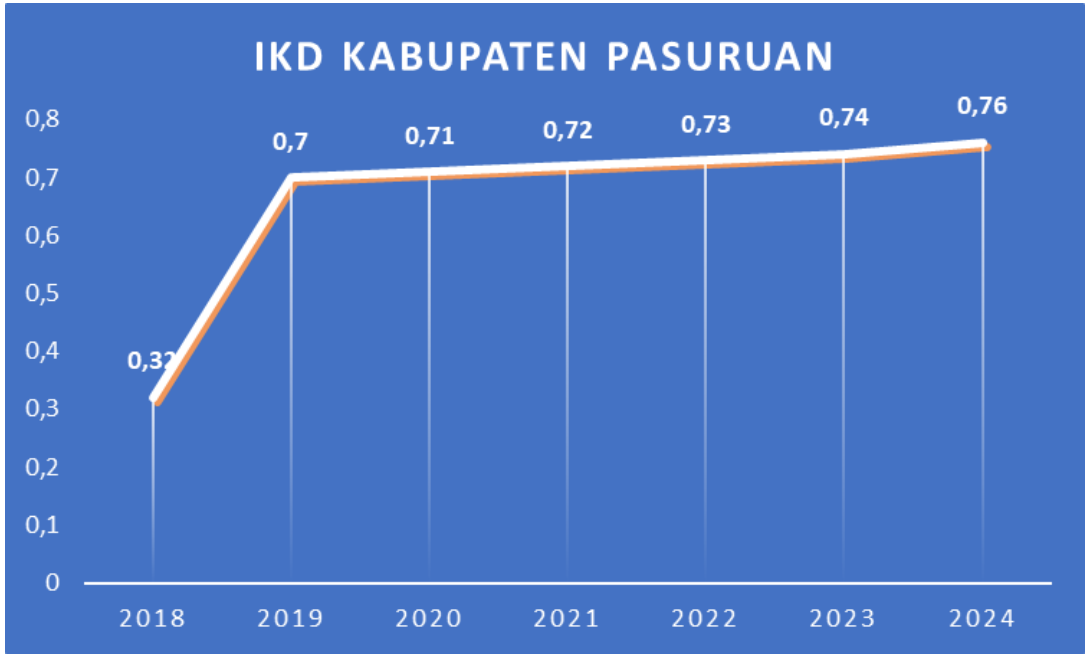
Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi kota/kabupaten dan propinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Dari IKD setiap kota/kabupaten dan propinsi mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tidak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Untuk realisasi tahun 2021 naik menjadi 0,72 yang di tahun 2020 0,71 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,73 dan pada tahun 2023 saat ini nilai IKD sebesar 0,74 sedangkan di 2018 nilai IKD Kabupaten Pasuruan adalah 0,32 dan pada tahun 2024 nilai IKD ada kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2023 sehingga menjadi 0,76.

Nilai IKD Kabupaten Pasuruan

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PASURUAN	0,32	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018



Adapun perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasuruan terhadap kota / kabupaten lain di Jawa Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah, sebagaimana table tersebut bahwa di tahun 2023 Kabupaten Pasuruan menempati urutan ke 6 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur , dimana Kabupaten Pamekasan dan Kab. Sidoarjo dengan nilai tertinggi sebesar 0,79 yang ke dua Kab. Lumajang dengan nilai 0,78, untuk Kota Kediri di posisi keempat dengan nilai IKD sebesar 0,77 dan disusul urutan ke lima oleh Kabupaten Mojokerto sebesar 0,76 dan Kabupaten Pasuruan dengan nilai 0,74 di urutan ke enam. Sedangkan untuk nilai IKD Provinsi di tahun 2023 sebesar 0,61. Kabupaten Pasuruan dengan nilai IKD 0,76 sudah diatas nilai Propinsi serta diatas rata rata kabupaten kota se Jawa Timur.

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	0,7	0,57	0,55	0,66	0,71	0,71	0,71
2	PONOROGO	0,47	0,45	0,5	0,54	0,53	0,55	0,56
3	TRENGGALEK	0,59	0,58	0,58	0,56	0,6	0,63	0,71
4	TULUNGAGUNG	0,67	0,57	0,58	0,65	0,64	0,65	0,66
5	BLITAR	0,4	0,43	0,52	0,56	0,58	0,6	0,65
6	KEDIRI	0,45	0,52	0,5	0,54	0,59	0,63	0,67
7	MALANG	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	0,64	0,64
8	LUMAJANG	0,57	0,7	0,76	0,75	0,75	0,78	0,78
9	JEMBER	0,46	0,4	0,71	0,55	0,56	0,55	0,65
10	BANYUWANGI	0,77	0,61	0,68	0,69	0,69	0,7	0,71
11	BONDOWOSO	0,32	0,34	0,72	0,76	0,55	0,6	0,62
12	SITUBONDO	0,32	0,44	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74
13	PROBOLINGGO	0,71	0,3	0,55	0,6	0,6	0,59	0,61
14	PASURUAN	0,32	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76
15	SIDOARJO	0,67	0,67	0,66	0,73	0,78	0,79	0,8
16	MOJOKERTO	0,32	0,57	0,61	0,69	0,7	0,76	0,79
17	JOMBANG	0,32	0,4	0,35	0,42	0,47	0,41	0,51
18	NGANJUK	0,32	0,52	0,54	0,54	0,56	0,64	0,63
19	MADIUN	0,32	0,53	0,26	0,39	0,42	0,35	0,51
20	MAGETAN	0,32	0,43	0,24	0,59	0,64	0,66	0,67
21	NGAWI	0,32	0,32	0,38	0,38	0,44	0,5	0,62
22	BOJONEGORO	0,46	0,51	0,53	0,56	0,59	0,59	0,6
23	TUBAN	0,32	0,32	0,42	0,46	0,48	0,51	0,53
24	LAMONGAN	0,51	0,59	0,56	0,62	0,7	0,65	0,64
25	GRESIK	0,55	0,57	0,57	0,61	0,57	0,65	0,71
26	BANGKALAN	0,43	0,4	0,51	0,56	0,58	0,58	0,66
27	SAMPANG	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,62	0,63
28	PAMEKASAN	0,32	0,2	0,3	0,63	0,79	0,79	0,79
29	SUMENEP	0,32	0,37	0,62	0,53	0,61	0,63	0,68
30	KOTA KEDIRI	0,32	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77	0,5
31	KOTA BLITAR	0,32	0,38	0,49	0,31	0,4	0,43	0,47
32	KOTA MALANG	0,32	0,44	0,44	0,56	0,72	0,61	0,63
33	KOTA PROBOLINGGO	0,32	0,5	0,59	0,55	0,38	0,41	0,43
34	KOTA PASURUAN	0,32	0,58	0,46	0,45	0,47	0,48	0,52
35	KOTA MOJOKERTO	0,32	0,25	0,42	0,42	0,42	0,42	0,37
36	KOTA MADIUN	0,32	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46	0,51
37	KOTA SURABAYA	0,32	0,37	0,37	0,42	0,45	0,56	0,63
38	KOTA BATU	0,32	0,56	0,51	0,53	0,56	0,64	0,68
	IKD KAB/KOTA	0,42	0,47	0,52	0,56	0,58	0,61	0,63

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

Indikator Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggara 2021 adalah Indeks Resiko Bencana (IRB). Pada tahun 2021

terdapat angka penurunan Indeks Resiko Bencana sebesar 17,08 yaitu angka Indeks Resiko Bencana tahun 2020 sebesar 156,26 turun menjadi angka Indeks Resiko Bencana tahun 2021 sebesar 139,18. Dan pada tahun 2022 nilai IRB Kabupaten Pasuruan sebesar 126,32 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 12,86 sedangkan nilai IRB di tahun 2023 sebesar 116,77 ada penurunan nilai IRB dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 9,55. Sedangkan pada tahun 2024 nilai IRB Kabupaten Pasuruan sebesar 109,38

Dalam menekan angka Indeks Resiko Bencana tahun 2024 dikatakan berhasil karena Indeks Resiko Bencana sudah mengalami penurunan sebesar 7,39.

N O	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PACITAN	215,2	215,2	192	126,2	123,1	121,3	116,4	111,1	107	103,7
2	PONOROGO	155,2	155,2	155,2	140,8	127,1	115,6	106,5	99,83	94,24	89,74
3	TRENGGALEK	198	198	198	170,9	151,3	151,3	151,3	136	124	113,3
4	TULUNGAGUNG	201,2	201,2	201,2	169,8	151,4	137,7	126,3	118	111,3	106
5	BLITAR	210	210	210	198,1	178,4	160,3	146,1	134,9	125,8	117,6
6	KEDIRI	178	178	178	163,1	144,4	131,5	121,5	112,5	104,5	97,89
7	MALANG	219,2	219,2	199,8	142,1	137,1	133,2	128,8	124,3	118,6	114,3
8	LUMAJANG	231,2	231,2	200,8	129,7	123,8	117,8	113,8	110,5	107	104,1
9	JEMBER	219,2	219,2	219,1	198,8	182,2	158,2	146,3	137,2	130,2	122,1
10	BANYUWANGI	219,2	208,7	206,4	168,3	151,9	137,9	127,8	120,3	114,1	109,3
11	BONDOWOSO	166	166	166	166	151	128,8	112,4	105,2	98,38	92,86
12	SITUBONDO	168,4	168,4	168,4	168,4	149,4	128,4	113,5	102,4	94,11	87,88
13	PROBOLINGGO	194,00	194,00	194,00	162,3	156,7	141,2	128,9	119,7	113	107,6
14	PASURUAN	214	214	214	214	180,3	156,3	139,2	126,3	116,8	109,4
15	SIDOARJO	149,60	149,60	132	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69	69,88	67,57
16	MOJOKERTO	163,6	163,6	163,6	163,6	140,9	123,7	110,1	99,84	91,17	84,38
17	JOMBANG	154,8	154,8	154,8	154,8	138,4	128,6	119,2	110,2	105,2	98,52
18	NGANJUK	152,8	152,8	152,8	152,8	132,9	118,2	107,9	99,67	91,75	86,23
19	MADIUN	155,2	155,2	155,2	155,2	134,8	130,2	121,4	113,5	109,4	101,4
20	MAGETAN	152,8	152,8	152,8	152,8	135,8	131,3	115,7	103,5	94,17	87,07
21	NGAWI	143,2	143,2	143,2	143,2	131,1	120	120	109,7	100,3	90,99
22	BOJONEGORO	150	104,7	101,4	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39	81,79	79,4
23	TUBAN	175,2	175,2	175,2	175,2	160,4	145	133	123,1	114,8	108

24	LAMONGAN	174,00	174,00	167,4	139,6	125,3	115,9	107,5	99,5	94,48	90,89
25	GRESIK	175,2	137,8	126,8	101,4	99,29	99,29	96,5	94,89	91,42	87,5
26	BANGKALAN	164,4	164,4	158,7	139	129,5	118,7	109,6	102,1	96,45	90,49
27	SAMPANG	154,8	154,8	154,8	154,8	140,6	127,2	116,4	106,2	97,01	90,09
28	PAMEKASAN	180,4	180,4	180,4	180,4	172,5	160,2	139,5	120,9	107,4	97,9
29	SUMENEP	204,8	204,8	204,8	204,8	184,6	160,4	146,2	133,3	123,1	114,3
30	KOTA KEDIRI	140,8	140,8	140,8	140,8	122,8	109,7	97,63	86,98	79,1	78,2
31	KOTA BLITAR	132	132	132	132	118,8	106,1	102,7	96,75	91,12	85,98
32	KOTA MALANG	113,6	113,6	113,6	113,6	100,8	91,26	82,25	73,13	68	63,89
33	KOTA PROBOLINGGO	148,4	148,4	148,4	148,4	129,8	114,2	104,1	101,3	97,72	94,33
34	KOTA PASURUAN	158,4	158,4	158,4	158,4	136,2	123,7	115,2	108,1	102,3	96,7
35	KOTA MOJOKERTO	142,8	142,8	142,8	142,8	134	120,6	120,6	110,6	103	98,69
36	KOTA MADIUN	136	136	136	136	121,3	116,7	116,7	108,9	99,64	91,61
37	KOTA SURABAYA	166,8	166,8	166,8	166,8	150,3	150,3	136,4	124,9	113,3	103,3
38	KOTA BATU	134,4	134,4	134,4	134,4	116,1	104,1	95,31	88,04	81,05	75,21
		Δ	-2,45	-3,15	-13,38	-14,52	-11,47	-9,16	-8,57	-7,04	-5,9
		171,4	168,9	165,8	152,4	137,9	126,4	117,3	108,7	101,7	95,75

Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan terhadap Kota / Kabupaten lain di Jawa Timur

IRB Kabupaten Pasuruan dengan nilai 109,28 pada tahun 2024 membuat Kabupaten Pasuruan berada di posisi 32 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk nilai IRB nya. Sedangkan untuk IRB Provinsi Jawa Timur sebesar 95,75

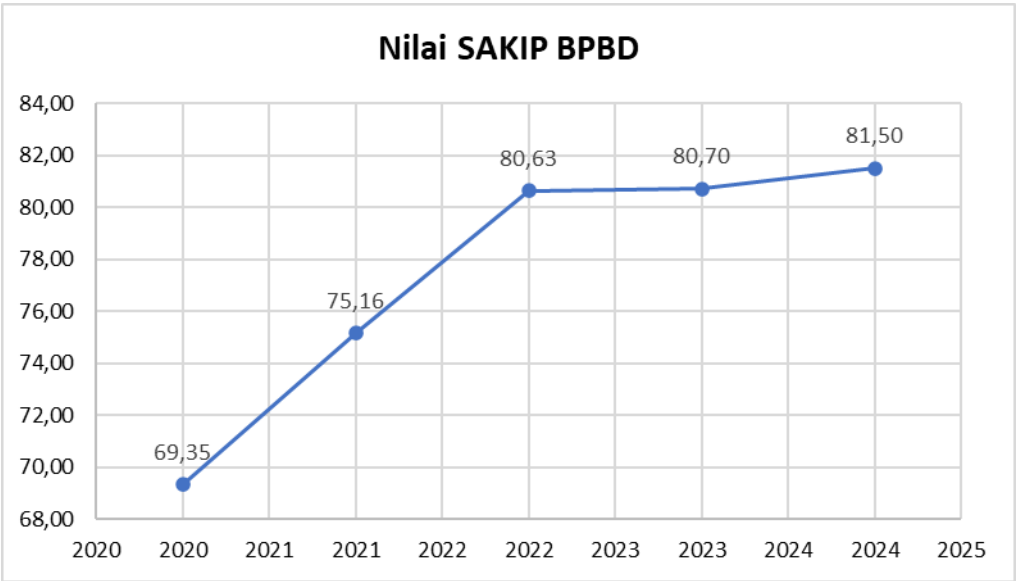
- Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran :

- Nilai SAKIP.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan

kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 dengan kategori A dan pada tahun 2023 nilai SAKIP BPBD sebesar sedangkan di tahun 2024 nilai SAKIP BPBD sebesar 81.50.

NILAI SAKIP BPBD KABUPATEN PASURUAN



Gambar 3.2 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan
dari tahun 2020

Dari tabel capaian kinerja di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pada Indikator Kesatu, yaitu Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana;**

Di karenakan ada perubahan Indikator Utama tahun 2023 yang sebelumnya indikator Kinerja (IKD) utama BPBD adalah Indeks Ketahanan Daerah sedangkan pada tahun 2024 mempunyai indikator kinerja sasaran yaitu ada 4 anantara lain :

- 1)Persentase warga negara yang memperoleh layanan

informasi rawan bencana dengan target sebesar 0,21 %, realisasi 0,7245% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 348%

- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05%, realisasi 0,4031% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 13%
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dengan target sebesar 100%, realisasi 100% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 100%
- 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan target sebesar 100%, realisasi 100% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2024) sebagai berikut : target tahun 2024 sebesar 0,745 tercapai 0,76 Capaian sesuai sehingga persentase capaian 102%.

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2024) dengan capaian tahun lalu (2023) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2023 sebesar 0,74 dan pada tahun 2024 sebesar 0,76.

2. Pada Indikator Kedua, yaitu Nilai SAKIP;

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun (2022) sebagai berikut : target tahun 2022 sebesar 77,50 tercapai 80,60. Capaian melebihi target sehingga persentase capaian sebesar 104,04%. Pada tahun 2023 target nilai SAKIP sebesar 80,70 dan tercapai sebesar 80,70. Capaian sesuai target sehingga persentase capaian sebesar 100% di tahun 2024 nilai SAKIP BPBD sebesar 81,50 realisasinya melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,25 atau dengan prosesntase capaian sebesar 100,3%.

3.1.1. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70s/d 84 : Berasil

55 s/d 69 : Cukup Berhasil

< 55 : Tidak Berhasil

Kinerja BPBD pada tahun 2024 tergolong berhasil dikarenakan capaian sasaran sebesar 101,50% serta tingkat efisiensi sebesar 3,12%. Adapun unsur yang mempengaruhi keberhasilan antara lain di dukung oleh kondisi internal, kondisi eksternal serta adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung.

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD adalah dengan adanya teamwork yang solid serta melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing masing personil, pimpinan yang memberikan perhatian di semua pelaksanaan kegiatan, serta setiap hari kamis dilakukan perencanaan dan evaluasi oleh pimpinan yang di ikuti oleh seluruh pegawai BPBD, dengan adanya perencanaan dan evaluasi di setiap minggu maka target dan evaluasi perbaikan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD antara lain adanya dukungan dari legislative mendukung kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan meng gunakan anggaran Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir) Kabupaten Pasuruan. Adanya relawan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana di kabupaten Pasuruan baik dalam memberikan informasi, pencarian, pertolongan maupun evakuasi korban bencana alam. Serta adanya dukungan dari Pmerintah Propinsi dan

Pusat yang selalu mendukung kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan.

Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 rata-rata mencapai 101,50%. Hal ini dapat diartikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja sebesar 101,50% tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam program dan kegiatan selama tahun 2023. Sedangkan pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 rata-rata mencapai 126,74%.

Penyebab dari adanya realisasi kinerja dikarenakan pada tahun 2024 BPBD mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sehingga kinerja BPBD meningkat, sedangkan penurunan kinerja pada Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05%, realisasi 0,4031% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 13% dikarenakan adanya efisien anggaran yang bersumber dari pokok pikiran.

Tujuan BPBD adalah Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %. Peningkatan nilai IKD didukung oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu, adanya sumber pendanaan dari DBHCHT, adanya bantuan Dana Siap Pakai dari Propinsi dan BNPB, ada bantuan kegiatan dari organisasi masyarakat LPBI NU untuk pembentukan desa tangguh bencana serta bantuan lain dari dunia industri dan dunia usaha.

Sasaran 1 BPBD Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator sasaran ada 4 yaitu :

- a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Keberhasilan dari indikator tersebut dikarenakan adanya bantuan anggaran dari

pokok pikiran serta dilakukannya kegiatan sosialisasi melalui digital.

- b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban Capaian yang tergolong rendah dikarenakan adanya refokusing anggaran yang bersumber dari pokok pikiran
- c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban Keberhasilan capaian disebabkan adanya bantuan dari Propinsi dan BNPB berupa DSP serta logistik.
- d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya bantuan pokok pikiran.

Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP target tahun 2024 sebesar 81,25 Realisasi Tahun 2024 sebesar 81,50 dengan Capaian 103 %. Keberhasilan terbut disebabkan oleh Komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, Komitmen manajemen yang tinggi serta dukungan dari seluruh entitas.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00 %
1.05.03.2.0 1	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (orang)</i>	9.960 Orang (249 Kegiat an)		1	1	100%	3320	3320	100,00 %
1.05.03.2.0 1.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (dokumen)	1							

1.05.03.2.0 1.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1							
1.05.03.2.0 1.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (orang)	9960		3320	3320	100%			
1.05.03.2.0 1.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	9960		3320	3320	100%	1520	1520	15,26%
1.05.03.2.0 2	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	100%		1	1	100%	1067 Orang	1067 Orang	100%
1.05.03.2.0 2.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dokumen)	1							

1.05.03.2.0 2.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1					1	1	100,00%
1.05.03.2.0 2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	2520		840	840	100%			
1.05.03.2.0 2.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	2520		840	840	100%	840	840	33,33%
1.05.03.2.0 2.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (dokumen)	36		12	12	100%			
1.05.03.2.0 2.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (Dokumen)	36		12	12	100%	12	12	33,33%
1.05.03.2.0 2.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Unit)	39		15	15	100%			

1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	39		15	15	100%	13	13	33,33%
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dokumen)	3		1	1	100%			
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Dokumen)	3		1	1	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	12		4	4	100%			
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	12		4	4	100%	4	4	33,33%
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	90		30	30	100%			

1.05.03.2.0 2.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	90		30	30	100%	30	30	33,33%
1.05.03.2.0 2.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)	4							
1.05.03.2.0 2.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)	4					0	0	0,00%
1.05.03.2.0 2.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	1050		1000	1000	100%			
1.05.03.2.0 2.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	1050		1000	1000	100%	1000	1000	95,24%
1.05.03.2.0 2.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)	3							
1.05.03.2.0 2.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)	3					1	1	33,33%
1.05.03.2.0 2.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	60		20	20	100%			

1.05.03.2.0 2.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	60		20	20	100%	20	20	100,00%
1.05.03.2.0 3	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Bantuan Sosial serta Penyelamatan dan Evakuasi Korban</i>	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.05.03.2.0 3.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	3							
1.05.03.2.0 3.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	3					1	1	100,00%
1.05.03.2.0 3.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	45		10	10	100%			
1.05.03.2.0 3.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	45		10	10	100%	10	10	100,00%
1.05.03.2.0 3.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	3.000		1000	1000	100%			

1.05.03.2.0 3.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	3000		1000	1000	100%	1000	1000	100,00%
1.05.03.2.0 3.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	800		200	200	100%			
1.05.03.2.0 3.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	800		200	200	100%	200	200	100,00%
1.05.03.2.0 3.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	3		1	1	100%			
1.05.03.2.0 3.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 3.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3							

1.05.03.2.0 3.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	3					1	1	100,00%
1.05.03.2.0 3.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)								
1.05.03.2.0 3.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (orang)								
1.05.03.2.0 4	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Laporan)</i>	6		1	1	100%			
1.05.03.2.0 4.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	3		1	1	100%			
1.05.03.2.0 4.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 4.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	3		1	1	100%			

1.05.03.2.0 4.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 4.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		1	1	100%			
1.05.03.2.0 4.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 4.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dokumen)	3		1	1	100%			
1.05.03.2.0 4.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 4.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	3		1	1	100%			

1.05.03.2.0 4.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 4.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	12							
1.05.03.2.0 4.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)			1	1	100%	1	1	100,00%
1.05.03.2.0 4.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)								
1.05.03.2.0 4.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)								
1.05.03.2.0 4.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokume)								

1.05.03.2.0 4.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)								
1.05.03.2.0 4.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Kelompok/Dunia Usaha)								
1.05.03.2.0 4.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Data)								
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.0 1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)</i>	3		1	1	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

X.XX.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		1	1	100%			
X.XX.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-Bulan)	648		156	156	100%			
X.XX.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-Bulan)	648		156	156	100%	156	156	100,00%
X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36		12	12	100%			
X.XX.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36		12	12	100%	12	12	100,00%

X.XX.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36		12	12	100%			
X.XX.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36		12	12	100%	12	12	100,00%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	60							
X.XX.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	60					0	0	
X.XX.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	61		31	31	100%			
X.XX.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	61		31	31	100%	31	31	100,00%

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	45		15	15	100%			
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	45		15	15	100%	15	15	100,00%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	106		46	46	100%			
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	106		46	46	100%	46	46	100,00%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150		75	75	100%			
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150		75	75	100%	75	75	100,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	45		15	15	100%			

X.XX.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	45		15	15	100%	15	15	100,00%
X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	28		12	12	100%			
X.XX.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	28		12	12	100%	12	12	100,00%
X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	28		12	12	100%			
X.XX.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	28		12	12	100%	12	12	100,00%
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	120		60	60	100%			
X.XX.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		60	60	100%	60	60	100,00%

X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (unit)</i>	55		100%	100%	100%	16	16	100,00%
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6							
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6					0	0	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1							
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1					0	0	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14		10	10	100%			
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	14		10	10	100%	10	10	100,00%

X.XX.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		10	10	100%			
X.XX.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14		10	10	100%	10	10	100,00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		1	1	100%	100%	100%	100,00%
X.XX.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	42		14	14	100%			
X.XX.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	42		14	14	100%	14	14	100,00%
X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	144		48	48	100%			
X.XX.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	144		48	48	100%	48	48	100,00%

X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (unit)</i>	99		1	1	100%	93 Unit	93 Unit	100,00%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52		22	22	100%			
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52		22	22	100%	22	22	100,00%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1	1	100%			
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1	1	100%	1	1	100,00%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	24		70	70	100%			

X.XX.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	24		70	70	100%	70	70	100,00%
-----------------------	---	--	----	--	----	----	------	----	----	---------

Capaian pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Tribulan II secara keseluruhan tercapai 45% atau Rp. 4.695.084.338. Realisasi tersebut dikarenakan pada awal tahun 2024 BPBD melaksanakan pindahan Gedung Kantor Baru, dari Kompleks perkantoran rasi ke Jl. Bendungan Kraton, sehingga pada awal tahun dilakukan pemenuhan sarana dan prasana gedung kantor seperti, AC, Mebelair, internet, jasa pindahan, gorden, karpet wallpaper dll.

Pada tahun 2026 berdasarkan regulasi yang ada, tidak diperbolehkan mengangkat/menggaji Tenaga Harian Lepas (THL), kondisi saat ini pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 18 orang tenaga non PNS/PPPK dan yang lulus PPPK sebanyak 11 orang sehingga menyisakan THL sebanyak 7 orang. Dari kondisi tersebut BPBD masih kekurangan banyak SDM dalam pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai Analisa Jabatan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK).

Tabel T.2.1.A Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
... diisi program urusan saja .. (tidak termasuk program penunjang)	target renstra 2025 dibagi target akhir periode 2026	... diambil dari tabel T-C.29 kolom 11 ...	lihat simoneva	
		... <100% (tidak memenuhi target)		
		... =100% (memenuhi target)		
		... >100% (melebihi target)		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100%	100,00%		

<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	3320	100,00%	kegiatan dapat dilaksanakan dengan metode luring dan daring	kedepan kegiatan daring lebih dioptimalkaan untuk memperluas pelayanan Informasi Rawan Bencana
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1520	15,26%		

<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	1067	33,33%	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode daring sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama dalam melaksanakan pelatihan	berkolaborasi dengan multi helix dalam upaya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	100,00%		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	840	33,33%		
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	33,33%		
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	13	33,33%		
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	33,33%		

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	33,33%		
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	30	33,33%		
Penyusunan Rencana Kontijensi				
Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0,00%		

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1000	95,24%		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1	33,33%		
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20	100,00%		

<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	100%	100,00%	Adanya dukungan dari unsur relawan dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	mendukung dan optimalisasi peran unsur relawan dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	100,00%		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10	100,00%		

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1000	100,00%		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	100,00%		
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	100,00%		
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1	100,00%		
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				

<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>			Adanya kolaborasi dengan SIAP SIAGA dalam penyusunan dokumen pasca bencana	Kolaborasi dengan multi helix dalam penataan sistem dasar penanggulangan bencana
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	100,00%		
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	100,00%		

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	100,00%		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	100,00%		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	100,00%		

Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota				
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1	100,00%		
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				

Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				

2.2 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70s/d 84 : Berasil

55 s/d 69 : Cukup Berhasil

< 55 : Tidak Berhasil

Kinerja BPBD pada tahun 2024 tergolong berhasil dikarenakan capaian sasaran sebesar 101,50% serta tingkat efisiensi sebesar 3,12%. Adapun unsur yang mempengaruhi keberhasilan antara lain di dukung oleh kondisi internal, kondisi eksternal serta adanya program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung.

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD adalah dengan adanya teamwork yang solid serta melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing masing personil, pimpinan yang memberikan perhatian di semua pelaksanaan kegiatan, serta setiap hari kamis dilakukan perencanaan dan evaluasi oleh pimpinan yang di ikuti oleh seluruh pegawai BPBD, dengan adanya perencanaan dan evaluasi di setiap minggu maka target dan evaluasi perbaikan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kinerja BPBD antara lain adanya dukungan dari legislative mendukung kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan meng gunakan anggaran Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir) Kabupaten Pasuruan. Adanya relawan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana di kabupaten Pasuruan baik dalam memberikan informasi, pencarian, pertolongan maupun evakuasi korban bencana alam. Serta adanya dukungan dari Pmerintah Propinsi dan Pusat yang selalu mendukung kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan.

Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 rata-rata mencapai 101,50%. Hal ini dapat diartikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja

sebesar 101,50% tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam program dan kegiatan selama tahun 2023. Sedangkan pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 rata-rata mencapai 126,74%.

Penyebab dari adanya realisasi kinerja dikarenakan pada tahun 2024 BPBD mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sehingga kinerja BPBD meningkat, sedangkan penurunan kinerja pada Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebesar 3,05%, realisasi 0,4031% atau prosentase kinerja terhadap target sebesar 13% dikarenakan adanya efisien anggaran yang bersumber dari pokok pikiran.

Tujuan BPBD adalah Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) target tahun 2024 sebesar 0,745 Realisasi Tahun 2024 dengan Capaian 102 %. Peningkatan nilai IKD didukung oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu, adanya sumber pendanaan dari DBHCHT, adanya bantuan Dana Siap Pakai dari Propinsi dan BNPB, ada bantuan kegiatan dari organisasi masyarakat LPBI NU untuk pembentukan desa tangguh bencana serta bantuan lain dari dunia industri dan dunia usaha.

Sasaran 1 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator sasaran ada 4 yaitu :

- a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Keberhasilan dari indikator tersebut dikarenakan adanya bantuan anggaran dari pokok pikiran serta dilakukannya kegiatan sosialisasi melalui digital.
- b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban Capaian yang tergolong rendah dikarenakan adanya refokusing anggaran yang bersumber dari pokok pikiran
- c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban Keberhasilan capaian disebabkan adanya bantuan dari Propinsi dan BNPB berupa DSP serta logistik.
- d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya bantuan pokok pikiran.

Sasaran 2 BPBD Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan Indikator Nilai SAKIP target tahun 2024 sebesar 81,25

Realisasi Tahun 2024 sebesar 81,50 dengan Capaian 103 %. Keberhasilan terbut disebabkan oleh Komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, Komitmen manajemen yang tinggi serta dukungan dari seluruh entitas.

3.1.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

SASARAN STRATEGIS	DATA KINERJA			DATA ANGGARAN PER INDIKATOR			TINGKAT EFESIENSI (%)
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %)	
1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	0,745	0,76	102%	5.973.547.865	5.937.095.122	99,39	102,63
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	81,25	81,50	100,3%	5.129.308.413	4.992.162.138	97,33	103,1

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BPBD tahun 2024 dipaparkan antara sasaran strategis, data kinerja yang berisi target, realisasi dan capaian, kemudia di dibandingkan dengan data anggaran per indikator yang berisi target, realisasi dan capaian sehingga diketahui tingkat efisiensi. Sasaran kinerja di tahun 2024 BPBD ada 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana dengan target 0,745 untuk realisasi dan capaiannya sebesar 0,76 sedangkan data anggaran target sebesar Rp. 5.973.547.865 realisasi sebesar Rp. 5.937.095.122 capaiannya sebesar 99,39% sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi sebesar 102,63%. Untuk sasaran kinerja ke 2 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan target nilai SAKIP di tahun 2024 sebesar 81,25 terealisasi sebesar 81,50 sehingga capaiannya sebesar 100,3%, sedangkan untuk anggarannya sebesar 5.129.308.413 terealisasi 4.992.162.138 capaian sebesar 97,33 % . Anggaran yang tidak terealisasi paling besar adalah dari belanja Pegawai yaitu dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 86.373.506. sehingga tingkat efisiensi sebesar 103,1%.

ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN KINERJA	EFESIENSI
11.102.856.27	10.929.257.260	98,36%	101,15%	102,84%

8				
---	--	--	--	--

BPBD pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 11.102.856.278 dan di akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 10.929.257.260 capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 98,36%, sedangkan capain kinerja sebesar 101,15% . Maka tingkat efisiensi sebesar 102,84%

kegiatan selama tahun 2024. Sesuai pada table2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahu n n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												perbandingan realisasi dengan target tahun tsb/ akhir periode, atau perbandingan dengan standar nasional
1	Indikator Tujuan :											
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			0,745	0,765	0,77	0,775	0,76		0,77	0,775	
2	Indikator Sasaran :											
	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			0,21%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2. Persentase warga negara yang			3,05%	0,418	0,4336	0,4488	0,4032		0,4336%	0,4488%	

	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				4%	%	%	%				
	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	5. Nilai SAKIP			81,00	81,75	82,00	82,25	81,50		82,00	82,25	
3	Indikator SPM :											
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

	5. Persentase aparaturnya dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

	12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Indikator Kinerja Kunci											
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			3.320 orang	65.732 orang	65.732 orang	65.732 orang	65.732 orang		65.732 orang	65.732 orang	
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			2.070 orang	3.320 orang	3.320 orang	3.320 orang	2.365 orang		3.320 orang	3.320 orang	
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	103.100 orang		1.000 orang	1.000 orang	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASURUAN

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD, dalam hal ini Unsur Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana, berperan pada tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Fungsi komando diperlukan ketika menghadapi keadaan tanggap darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilakukan oleh Unsur Pelaksana BPBD sendiri secara internal dan eksternal dalam upaya penanggulangan bencana pada semua tahapan.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana dan dalam upaya sinkronisasi 33 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026, yang mana BPBD masuk pada Prioritas sebagai berikut :

1. Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
2. Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir;
3. Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air.
4. penataan kawasan ibukota Bangil;
5. Digitalisasi layanan public, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE.

Berdasarkan hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini bilamana ditinjau dengan kondisi internal (Kekuatan / *Strengths* dan Kelemahan / *Weakness*) serta kondisi eksternal (Peluang / *Opportunity* dan Tantangan / *Threats*) dapat diperoleh sebagai berikut:

A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan

Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan;

- 3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyeleng-garaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT);
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD;

B. Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (Weakness)

- 1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 , permasalahan-permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan)
- 2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana

- 3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana
- 4) Meluasnya bencana kekeringan yang diakibatkan adanya perubahan iklim
- 5) Adanya bencana tanah gerak di Dusun Sempu Desa Cowek Kecamatan Purwodadi.

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam rancangan Renstra seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang lebih rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini, yaitu :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 8) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- 9) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- 10) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;

- 11) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan.

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Bupati Pasuruan yaitu Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya memberi Daya Ungkit dalam prioritas Pembangunan Bupati Pasuruan yaitu berkaitan dengan mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Secara kongkrit pada tahun 2025 dalam P-APBD BPBD melakukan pemabngunan shelter kebencanaan di tiga lokasi rawan Banjir yaitu di Kecamatan Bangil, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Wionongan.

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Bupati Pasuruan tentang Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya mengatasi bencana kekeringan. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan

dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Keterkaitan dengan Proyek Strategis Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya memberi Daya Ungkit dalam Proyek Strategis Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bangil. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

Seperti yang terpaparkan pada table dibawah ini.

Tabel 3.4
Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024-2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator or Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHB HT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Ket
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi,	3.320 Orang	195.794.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

						informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	635.782.120,01	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	173.790.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	252 Unit	1.236.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

						tinggalnya							
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15 Kawasan	372.372.800,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.000 orang	38.500.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000 Orang	96.000.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	53.824.700,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam proses penyusunan Renja dan RKA OPD serta menjadi dasar pedoman penyusunan KUA-PPAS dan R-APBD. Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara/pemerintah daerah dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka Kepala Daerah menyusun rancangan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Pada proses perencanaan, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu menyusun PPAS yang merupakan tindak lanjut dari penyusunan kebijakan umum APBD dan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan Renja BPBD Tahun 2026 sudah diupayakan menyesuaikan dengan kondisi internal/ eksternal BPBD serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pasuruan dan alokasi anggaran yang tersedia. Dimana usulan rencana kerja pada BPBD yang memuat serangkaian rencana program kerja/ kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKPD, Renstra OPD/ isu-isu/ program/Renstra dan Renja nasional yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	((3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	<u>100%</u>	<u>2.472.395.4 60</u>	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	<u>100%</u>	<u>2.472.395.4 60</u>	Pemen uhan SPM Sub Urusan Bencan a
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			

	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	3.320 Orang	195.794.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	3.320 Orang	195.794.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	3.320 orang	195.794.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	3.320 orang	195.794.000	

			selama 1 (satu) tahun					tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.375.631.760	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	1.375.631.760	
	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan		100%	1.201.841.760	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan		100%	1.201.841.760	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			

	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 dok	88.661.240	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 dok	88.661.240	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	252 unit	1.236.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	252 unit	1.236.000	

	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1290 Orang	73.977.600	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1290 Orang	73.977.600	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Pasuruan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga	29.812.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Pasuruan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 keluarga	29.812.000	

	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Pasuruan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	15 kawasan	372.372.800	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	15 kawasan	372.372.800	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	0	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	0	

	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	0	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 orang	635.782.120	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	840 orang	635.782.120	
	Terlaksananya Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan		100%	173.790.000	Terlaksananya Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Pasuruan		100%	173.790.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 orang	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 orang	0	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dok	0	

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Dok	173.790.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Dok	173.790.000	
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	590.970.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	2.000.000.000	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	1 Laporan	1.700.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	1 laporan	3.750.000	

			Penyakit/Wabah Prioritas					Penyakit/Wabah Prioritas			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dok	132.820.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15 dok	636.370.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.000 orang	38.500.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 orang	31.500.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	100.000 Orang	96.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75 Desa Rawan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan	300 orang	1.320.880.000	

			Evakuasi Korban Bencana					Evakuasi Korban Bencana			
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0 Dok	0	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0 Dok	0	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50 Orang	0	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	320.250.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando	1 laporan	3.750.000	

								Penanganan Darurat Bencana			
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dok	1.700.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 dok	3.750.000	
	Kegiatan:		Output:			Kegiatan:		Output:			
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 laporan	309.999.700	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	9 laporan	309.999.700	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			

	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dok	1.360.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 dok	1.360.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	0	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	0	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok	250.080.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok	250.080.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	3.375.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	3.375.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Kab. Pasuruan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	62 Orang	0	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan	Kab. Pasuruan	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang	62 Orang	0	

	Bencana Kabupaten/Kota					Bencana Kabupaten/Kota		memiliki kompetensi			
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	48 Orang	0	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	48 Orang	0	

	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Laporan	0	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Laporan	0	
--	---	---------------	---	-----------	---	---	---------------	---	-----------	---	--

	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	0	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	2 Lembaga	0	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di	Kab. Pasuruan	Jumlah data penduduk terpilah di	75 Laporan	0	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di	Kab. Pasuruan	Jumlah data penduduk terpilah	75 Laporan	0	

	daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		daerah rawan bencana			daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		di daerah rawan bencana			
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok	1.360.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dok	1.360.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 dok	53.824.700	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 dok	53.824.700	

	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dok	0	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dok	0	
			Nilai SAKIP	A (82,00)				Nilai SAKIP	A (82,00)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	<u>100%</u>	<u>3.946.717.540</u>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Pasuruan	Outcome : Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	<u>100%</u>	<u>3.946.717.540</u>	Untuk pemenuhan kebutuhan SDM (pegawai/pejabat)
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	0	dengan komposisi jabatan pada SOTK baru, pemenuhan sarana dan prasarana serta operasional Gedung Baru BPBD
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.878.416.077	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	2.878.416.077	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 orang-bulan	2.703.816.077	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima	216 orang	2.703.816.077	

								Gaji dan Tunjangan ASN	- bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	105.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	105.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	69.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	69.600.000	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	0	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
	Monitoring, Evaluasi, dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,	0	0	Monitoring, Evaluasi, dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	0	0	

	Penilaian Kinerja Pegawai		dan Penilaian Kinerja Pegawai			Penilaian Kinerja Pegawai		Penilaian Kinerja Pegawai			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	0	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	290.725.490	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	290.725.490	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	3.713.740	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	3.713.740	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	5.324.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 paket	5.324.000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	48.976.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	48.976.150	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	17.726.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	17.726.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dok	13.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dok	13.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 laporan	72.855.100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 laporan	72.855.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	128.430.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	128.430.000	

	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	12 unit	0	
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Alat Besar	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	Pengadaan Alat Besar	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0	

	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	200.331.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	200.331.300	

						Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	194.331.300	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	194.331.300	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	
	Kegiatan :		Output :			Kegiatan :		Output :			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 unit	577.244.673	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	93 unit	577.244.673	

						Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan:		Output:			Sub Kegiatan:		Output:			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	357.371.673	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	357.371.673	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0	0	

	Perizinan Alat Besar					dan Perizinan Alat Besar						
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	39.873.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	39.873.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		

					6.419.113.0 00					6.419.113.0 00	
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	--

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Musrenbang biasanya setiap OPD menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat desa dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kabupaten. Di tingkat OPD yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum OPD itu sendiri. Forum OPD ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra OPD itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kabupaten para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki OPD yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif. Usulan terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

3. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana).
4. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan :
 - a. Pelatihan Dan Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana;
 - b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota;
 - e. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (pelatihan bagi masyarakat / warga negara di desa/ kelurahan yg wilayahnya beresiko tinggi terhadap rawan bencana);
 - f. Pelatihan dan peningkatan kapasitas keluarga yang tanggap bencana (materi sesuai dengan kerawanan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, angin putting beliung)
5. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana (terpal, sanbag, alat kebersihan, penyediaan kebutuhan dasar);
- 6. Kegiatan Penataan sistem dasar penganggulangan bencana dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan sistim informasi kebencanaan;

Tabel T-C.32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Tosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecamatan Tosari	Pokir Gerindra (Agus setya Wardana)
2	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Pandaan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecamatan Pandaan	Pokir PKB (A.Wasik Rahman Hamzah)
3	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	24 Kecamatan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	24 Kecamatan	Pokir PKB (H.M Sudiono Fauzan, S.Ag., MM)
4	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	13 Desa Kecamatan Purwo	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Desa	Pokir PKB (Abd Karim, M.Si)

	Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	dadi			
5	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Desa Kecamatan Tukur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	12 Desa	Pokir PKB (Abd Karim, M.Si)
6	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7 Desa Kecamatan Wonorejo	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Desa	Pokir PKB (Dra. Nur Laila)
7	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	3 Kecamatan (Pandanan, Prigen dan Sukorejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3 Kecamatan	Pokir PKB (A.Wasik Rahman Hamzah)
8	Program PenangPenataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kecamatan Prigen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Kecamatan	Pokir PKB (Agus Suyanto)

9	Program PenangPenataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Peng elolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kecam atan Sukor ejo	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Kecam atan	Pokir PKB (Agus Suyanto)
10	Program PenangPenataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Peng elolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kecam atan Panda an	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Kecam atan	Pokir PKB (Agus Suyanto)
11	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecam atan Kraton	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecam atan	Pokir PKS (Fatiyyah AZ Zahroh)
12	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecam atan Sukor ejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecam atan	Pokir PKS (Adib Ghoni Atqon)
13	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Latek Kecam atan Bangil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Orang	Musrenban g Kecamatan Bangil

14	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Ngadirjo Kecamatan Tutur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Tutur
15	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Pungging Kecamatan Tutur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Tutur
16	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Purwosari
17	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
18	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Krajan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
19	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan	Desa Blarang Kecamatan Tutur	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 Orang	Musrenbang Kecamatan Tutur

	Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
20	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Cangkringmalang Kecamatan beji	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Paket	Musrenbang Kecamatan beji
21	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Rejoso
22	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Mojotengan Kecamatan Sukorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Sukorejo
23	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Krajan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
24	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo

	Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
25	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
26	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Dusun Kurek Kecamatan Winongan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Winongan
27	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Carat Kecamatan Gempol	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Gempol
28	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Desa Dhomo Kecamatan Kraton	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	1 Desa	Musrenbang Kecamatan Kraton
29	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Desa Krajan Kecamatan Kraton	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	2 Desa	Musrenbang Kecamatan Kraton
30	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Desa Wareng Kecamatan Sukor	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	1 Unit	Musrenbang Kecamatan Sukorejo

	Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	ejo	kawasan tempat tinggalnya		
31	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Karan gsono Kecam atan Wonor ejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenban g Kecamatan Wonorejo
32	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Gemp ol Kecam atan Gemp ol	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenban g Kecamatan Gempol
33	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Randu pitu Kecam atan Gemp ol	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	Musrenban g Kecamatan Gempol
34	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosi alisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman	Desa Wonor ejo Kecam atan Wonor ejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat	40 Orang	Musrenban g Kecamatan Wonorejo

	Bencana)		Tinggalnya		
35	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	9 Desa	Musrenbang (Gform) Kecamatan Pohjentrek
36	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Gempol	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	30 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gempol
37	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Nguling	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	60 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Nguling
38	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kecamatan Winongan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Winongan

39	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kecamatan Winongan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Winongan
40	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Wonorejo
41	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Satpolpp	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	10 Orang	Musrenbang (Gform) Satpolpp
42	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
43	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Sukorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Sukorejo

44	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Rejoso	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 Kali Kegiatan	Musrenbang (Gform) Kecamatan Rejoso
45	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Winongan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Winongan
46	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Purwosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang dan 2 Chainsaw	Musrenbang (Gform) Kecamatan Purwosari
47	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	9 Desa	Musrenbang (Gform) Kecamatan Pohjentrek
48	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Wonorejo

49	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Satpol pp	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2 Kegiatan @30 Orang	Musrenbang (Gform) Satpolpp
50	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Bangil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Bangil
51	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
52	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Wonorejo
53	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Pohjentrek

54	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
55	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
56	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Rejoso	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	Musrenbang (Gform) Kecamatan Rejoso

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Tosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecamatan Tosari	Pokir Gerindra (Agus setya Wardana)
2	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Pandaan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecamatan Pandaan	Pokir PKB (A.Wasik Rahman Hamzah)
3	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	24 Kecamatan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	24 Kecamatan	Pokir PKB (H.M Sudiono Fauzan, S.Ag., MM)
4	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	13 Desa Kecamatan Purwodadi	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	13 Desa	Pokir PKB (Abd Karim, M.Si)

	Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Kesiapsiagaan Bencana		
5	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12 Desa Kecamatan Tukur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	12 Desa	Pokir PKB (Abd Karim, M.Si)
6	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7 Desa Kecamatan Wonorejo	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Desa	Pokir PKB (Dra. Nur Laila)
7	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	3 Kecamatan (Pandaan, Prigen dan Sukorejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	3 Kecamatan	Pokir PKB (A.Wasik Rahman Hamzah)

			Kawasan Tempat Tinggalnya		
8	Program PenangPenataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kecamatan Prigen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Kecamatan	Pokir PKB (Agus Suyanto)
9	Program PenangPenataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kecamatan Sukorejo	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Kecamatan	Pokir PKB (Agus Suyanto)
10	Program PenangPenataan Sistem Dasar Penanggulangan BencanaPelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kecamatan Pandaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Kecamatan	Pokir PKB (Agus Suyanto)
11	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Kraton	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecamatan	Pokir PKS (Fatiyyah AZ Zahroh)

12	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Sukorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Kecamatan	Pokir PKS (Adib Ghoni Atqon)
13	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Latek Kecamatan Bangil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Bangil
14	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Tukur
15	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Pungging Kecamatan Tukur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Tukur
16	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Purwosari

17	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
18	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Krajan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
19	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Blarang Kecamatan Tukur	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 Orang	Musrenbang Kecamatan Tukur
20	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Cangkringmala ng Kecamatan beji	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 Paket	Musrenbang Kecamatan beji
21	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Rejoso

22	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Mojotengan Kecamatan Sukorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Sukorejo
23	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Krajan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
24	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
25	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo
26	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Dusun Kurek Kecamatan Winongan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Winongan

27	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Desa Carat Kecamatan Gempol	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Gempol
28	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Desa Dhompo Kecamatan Kraton	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	1 Desa	Musrenbang Kecamatan Kraton
29	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Desa Krajan Kecamatan Kraton	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	2 Desa	Musrenbang Kecamatan Kraton
30	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Wareng Kecamatan Sukorejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	Musrenbang Kecamatan Sukorejo
31	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Desa Karangsono Kecamatan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Wonorejo

	Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Wonorejo	Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		
32	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Gempol Kecamatan Gempol	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang Kecamatan Gempol
33	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Randupitu Kecamatan Gempol	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	Musrenbang Kecamatan Gempol
34	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang	40 Orang	Musrenbang Kecamatan Wonorejo

			Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		
35	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	9 Desa	Musrenbang (Gform) Kecamatan Pohjentrek
36	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Gempol	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	30 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gempol

37	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota/Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kecamatan Nguling	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	60 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Nguling
38	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kecamatan Winongan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Winongan
39	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kecamatan Winongan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Winongan
40	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Wonorejo

	Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				
41	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Satpolpp	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	10 Orang	Musrenbang (Gform) Satpolpp
42	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
43	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Sukorejo	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Sukorejo
44	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Rejoso	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 Kali Kegiatan	Musrenbang (Gform) Kecamatan Rejoso
45	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Kecamatan Winongan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Winongan

	Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Mitigasi Bencana		
46	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Purwosari	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang dan 2 Chainsaw	Musrenbang (Gform) Kecamatan Purwosari
47	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	9 Desa	Musrenbang (Gform) Kecamatan Pohjentrek
48	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Wonorejo
49	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Satpolpp	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2 Kegiatan @30 Orang	Musrenbang (Gform) Satpolpp
50	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Kecamatan Bangil	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Bangil

	Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
51	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Orang	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
52	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Wonorejo
53	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Pohjentrek
54	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan

	Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		
55	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Paket	Musrenbang (Gform) Kecamatan Gondangwetan
56	Program Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana/Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kecamatan Rejoso	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	Musrenbang (Gform) Kecamatan Rejoso

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup:

- a) prinsip cepat dan tepat;
- b) prioritas;
- c) koordinasi dan keterpaduan;
- d) berdaya guna dan berhasil guna;
- e) transparansi dan akuntabilitas;
- f) kemitraan;
- g) pemberdayaan;
- h) non diskriminatif; dan
- i) non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi :

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana sesuai RPJMN Tahun 2020-2024 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana tabel 3.1 berikut dibawah ini:

MATRIKS PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN KE DALAM SASARAN STRATEGIS RENSTRA BNPB TAHUN 2020-2024

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
1.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana.
		Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi secara nasional dan daerah yang diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.
3.	Pembangunan rendah karbon, dilakukan melalui upaya	Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan	Indeks Reformasi Birokrasi.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020- 2024	STRATEGI RPJMN 2020-2024	SASARAN STRATEGIS BNPB 2020-2024	OUTCOME
	penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, Industri, dan kelautan.		bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	
		Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi Penanggulangan Bencana		
		Penguatan penanganan darurat bencana		
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana		
		Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan sistem peringatan dini INATEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) dan MHEWS (Multi Hazard Early Warning System)		
		Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui sosial reengineering ketahanan bencana multilevel terutama level keluarga, komunitas maupun desa		
		Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana		

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah kabupaten Pasuruan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada Rencana Startegis BPBD Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana”** dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
- b. Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana”** dengan empat indikator seperti dibawah :
 - 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 100 %
 - 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 0,4336 %
 - 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban sebesar 100%
 - 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun sebesar 100%

Tabel 3.2.A Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.2.A

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,76	0,765	0,77
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,4032%	0,4184%	0,4336%

	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%
	4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	100%	100%	100%
	5. Nilai SAKIP	81,50	81,75	82,00
Indikator SPM	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%
	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%
	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%
	5. Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100%	100%	100%
	6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
	7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%
	8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	100%	100%

	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	100%	100%	100%
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%
	12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Kunci	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	65.735 Orang	65.735 Orang	65.735 Orang
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.365 orang	3.320 Orang	3.320 Orang
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	103.100 orang	1.000 orang	1.000 orang

Tabel 3.2.B Sinkronisasi IKD dan IKU

Indikator Sasaran RPJMD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Resiko Bencana	IRB = Ancaman x (Kerentanan / Kapasitas)	118.55 - 115.73	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pengukuran IKD dengan berpedoman pada Juknis Perangkat Penilaian IKD (71 Indikator)	0,77	
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawab bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana) x 100%	100%	Program Penanggulangan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana) x 100%	0,4336%	Program Penanggulangan Bencana

			Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban / Jumlah korban bencana keseluruhan) x 100%	100%	Program Penanggulangan Bencana
			Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	(Jumlah dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun / Jumlah dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang direncanakan) x 100%	100%	Program Penanggulangan Bencana
			Nilai SAKIP	Hasil pengukuran oleh Inspektorat	82,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BPBD TAHUN 2026

Dalam Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya kualitas lingkungan**, maka untuk mempercepat terwujudnya tujuan tersebut diperlukan fokus pembangunan. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana**. Adapun titik berat Rencana Kerja Perangkat Daerah BPBD pada tahun 2026 adalah upaya-upaya yang dapat mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, yaitu dengan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM aparatur Penanggulangan Bencana dan Masyarakat, peningkatan penguatan kapasitas masyarakat dan pelibatan peran serta masyarakat, lembaga usaha, kelompok rentan bencana dan elemen terkait lainnya mulai ormas, LSM, pemerhati kebencanaan, perguruan tinggi setempat, guru dan warga sekolah. Juga upaya pemenuhan kebutuhan standar minimal penanggulangan bencana, khususnya dalam hal pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta tiga isu bencana yaitu bencana banjir, bencana kekekringa serta tanah gerak di dusun sempu desa cowek Kecamatan Purwodadi.

3.3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas pada Renja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Program Penanggulangan Bencana		
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit
4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD

BPBD mempunyai 2 Program yang terdiri dari Program utama yang mempunyai 4 kegiatan yang terbagi dalam 33 sub kegiatan dan Program Penunjang yang terdiri dari 7 Kegiatan yang terbagi kedalam 35 sub kegiatan. Berdasarkan Pemetaan kebutuhan anggaran tahun 2026 BPBD membutuhkan anggaran sebesar Rp. 6,419,113,000 (Enam miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga belas ribu) yang terinci pada program dan kegiatan seperti dibawah ini :

1. Program Penanggulangan Bencana Rp. 2,472,395,460, BPBD sebagai salah satu pengampu SPM Sub Urusan Bencana sehingga berkewajiban dalam pemenuhan SPM, yang terbagi pada empat kegiatan :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp. 195,794,000
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 1,375,631,760
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 590,970,000
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp. 309,999,700
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3,946,717,540, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM

(pegawai/pejabat) dengan komposisi jabatan pada SOTK baru, pemenuhan sarana dan prasarana serta operasional Gedung Baru BPBD, yang terbagi pada tujuh kegiatan :

- a. Belanja Pegawai Rp. 2,703,816,076.99
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 0
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 577,244,673
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 290,725,490
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 0
- f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 0
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 200,331,300

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2025

Tabel 3.3

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas					
Indeks Resiko Bencana	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Ketahanan daerah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		

				Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

				Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
				Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis (jika ada)

Tabel 3.4 Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024-2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Peran gkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikat or Subkegi atan	Nilai Pagu Anggaran	Sumb er dana (DAU/ DAK/ DBHB HT/ ... diseb utkan)	Lokasi sasaran			Ket
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kec	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembanguna n / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	BPBD	PROGR AM PENAN GGULA NGAN BENCA NA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3.320 Orang	195.794.00 0,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Keca mata n	

				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Kawasan	635.782.120,01	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	173.790.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	252 Unit	1.236.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15 Kawasan	372.372.800,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.000 orang	38.500.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.000 Orang	96.000.000,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	53.824.700,00	DAU	75 Desa Rawan Bencana	75 Desa Rawan Bencana	24 Kecamatan	

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Bupati Pasuruan yaitu Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya memberi Daya Ungkit dalam prioritas Pembangunan **Bupati Pasuruan** yaitu berkaitan dengan **mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir**. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Secara kongkrit pada tahun 2025 dalam P-APBD BPBD melakukan pemabngunan shelter kebencanaan di tiga lokasi rawan Banjir yaitu di Kecamatan Bangil, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Wionongan.

Keterkaitan dengan prioritas pembangunan Bupati Pasuruan tentang Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran dalam Upaya mengatasi bencana kekeringan. Upaya tersebut di dukung dengan Program Penanggulangan Bencana dengan didukung kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota,

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Pembangunan infrastruktur Perkotaan Bangil : sub keg Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota)

Inovasi : BPBD dalam peningkatan pelayanan kepada Masyarakat melakukan inovasi yang berupa Inovasi Dini berbasis digital Urusan Kebencanaan atau yang disingkat INDIBIDUAN, inovasi ini pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan yang di bangun pada tahun 2022, INDIBIDUAN bertujuan untuk penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang informasi kebencanaan. Inovasi ini berada pada Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Subkegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan. Tujuan dari inovasi ini agar dapat tersampainya seluruh informasi kebencanaan kepada Masyarakat baik informasi pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana, guna mengurangi korban bencana pada Masyarakat.

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Tabel 3.5 Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
Indibiduan	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	250.080.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan didasarkan pada tujuan Rencana Strategis BPBD yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana”**. Rencana kerja BPBD tahun 2026 mencakup 2 program, 11 kegiatan dan 68 sub kegiatan yaitu seperti pada table dibawah ini :

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Program Penanggulangan Bencana		
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban

			Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu

			dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Alat Besar
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (samkaan Renja 2026)				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%		3.946.717.540			100%	4.090.383.33 9
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%		-			100%	400.000
X XX 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KABUPATEN PASURUAN	1 Dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH		1 Dok	100.000

			Perencanaan Perangkat Daerah							CHT/ Pajak Roko k			
								Belanja operasi	: Rp -				
								Belanja pegawai	: Rp -				
								Belanja barang dan jasa	: Rp -				
								Belanja bunga	: Rp -				
								Belanja subsidi	: Rp -				
								Belanja hibah	: Rp -				
								Belanja bantuan sosial	: Rp -				
								Belanja modal	: Rp -				
								Belanja tidak terduga	: Rp -				
								Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.01 0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KABUPATEN PASURUAN	1 Laporan		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 Laporan	100.000

							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN PASURUAN	4 Laporan		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		4 Laporan	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				

							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
??		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KABUPATEN PASURUAN	1 Berita Acara		Rp -		DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k	1 Berita Acara	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
		...										
X XX 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%		Rp 2.878.416.077			100%	3.353.718.76 9
X XX 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN PASURUAN	18 Orang/Bulan		Rp 2.703.816.077	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		18 Orang/Bulan	3.010.323.08 5
							Belanja operasi	: Rp 2.703.816.077				
							Belanja pegawai	: Rp 2.703.816.077				

							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.02 0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KABUPATEN PASURUAN	12 Dok		Rp 105.000.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		12 Dok	268.155.684
							Belanja operasi	: Rp 105.000.000				
							Belanja pegawai	: Rp 105.000.000				

							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.02 0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KABUPATEN PASURUAN	12 Dok		Rp 69.600.000	DAU/DAK/DBH/CHT/Pajak Rokok		12 Dok	75.240.000
							Belanja operasi	: Rp 69.600.000				
							Belanja pegawai	: Rp 69.600.000				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				

							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.05		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah		Persentase dokumen kependidikan yang akurat dan sesuai ketentuan		100%		Rp -			100%	300.000
X XX 01 2.05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KABUPATEN PASURUAN	0 Paket		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		40 Paket	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				

							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.05 0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	KABUPATEN PASURUAN	0 Dokumen		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 Dokumen	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

X XX 01 2.05 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KABUPATEN PASURUAN	0 Orang		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		40 Orang	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%		Rp 290.725.490			100%	238.266.351

X XX 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	15 paket		Rp 3.713.740	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		20 paket	3.342.366
							Belanja operasi	: Rp 3.713.740				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 3.713.740				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	30 paket		Rp 5.324.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		35 paket	4.791.600
							Belanja operasi	: Rp 5.324.000				

							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 5.324.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	0 paket		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		5 paket	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				

							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	75 paket		Rp 48.976.150	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		50 paket	44.078.535
							Belanja operasi	: Rp 48.976.150				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 48.976.150				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				

							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	15 paket		Rp 17.726.500	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		20 paket	15.953.850
							Belanja operasi	: Rp 17.726.500				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 17.726.500				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	KABUPATEN PASURUAN	12 dok		Rp 13.700.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/		8 dok	10.000.000

		Perundang-undangan		Undangan yang Disediakan					Pajak Roko k			
							Belanja operasi	: Rp 13.700.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 13.700.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KABUPATEN PASURUAN	12 laporan		Rp 72.855.100	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		8 laporan	60.000.000
							Belanja operasi	: Rp 72.855.100				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp 72.855.100				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN PASURUAN	60 laporan		Rp 128.430.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		40 laporan	100.000.000
							Belanja operasi	: Rp 128.430.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 128.430.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				

							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100%		Rp -			100%	700.000
X XX 01 2.07 0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	4 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		4 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				

							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	2 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		2 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

X XX 01 2.07 0003		Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	1 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.07 0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	15 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		15 unit	100.000

							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	10 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		10 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				

							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.07 0009		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	20 Unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		20 Unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				

							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.07 0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KABUPATEN PASURUAN	15 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		15 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

X XX 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%		Rp 200.331.300			100%	155.500.000
X XX 01 2.08 0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KABUPATEN PASURUAN	14 laporan		Rp 6.000.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		14 laporan	5.400.000
							Belanja operasi	: Rp 6.000.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 6.000.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	KABUPATEN PASURUAN	48 Laporan		Rp 194.331.300	DAU/ DAK/ DBH CHT/		55 Laporan	150.000.000

				<i>Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>					<i>Pajak Rokok</i>			
							<i>Belanja operasi</i>	: Rp 194.331.300				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 194.331.300				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	: Rp -				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -				
							<i>Belanja transfer</i>	: Rp -				
<i>X XX 01 2.08 0003</i>		<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	KABUPATEN PASURUAN	<i>70 laporan</i>		<i>Rp -</i>	<i>DAU/DAK/DBH CHT/Pajak Rokok</i>		<i>70 laporan</i>	<i>100.000</i>
							<i>Belanja operasi</i>	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	: Rp -				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -				
							<i>Belanja transfer</i>	: Rp -				
X XX 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD kondisi baik		100%		Rp 577.244.673			100%	341.498.219
X XX 01 2.09 0001		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	KABUPATEN PASURUAN	15 unit		<i>Rp 357.371.673</i>	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		15 unit	250.000.000
							<i>Belanja operasi</i>	: Rp 357.371.673				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp 357.371.673				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KABUPATEN PASURUAN	0 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		15 unit	1.198.219
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				

							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.09 0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	KABUPATEN PASURUAN	0 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		10 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				

							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.09 0005		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	KABUPATEN PASURUAN	0 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		15 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

X XX 01 2.09 0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KABUPATEN PASURUAN	15 Unit		Rp 39.873.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		15 Unit	60.000.000
							Belanja operasi	: Rp 39.873.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 39.873.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KABUPATEN PASURUAN	15 Unit		Rp 180.000.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		15 Unit	30.000.000
							Belanja operasi	: Rp 180.000.000				

							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 180.000.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
X XX 01 2.09 0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KABUPATEN PASURUAN	0 unit		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		15 unit	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				

							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
	Urusan											
	Bidang ...											
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana		(diisi)	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana		100%		Rp 2.472.395.460			100%	1.659.858.086
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang terlaksana		100%		Rp 195.794.000			100%	176.314.600
1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis	KABUPATEN PASURUAN	3.320 orang			Rp 195.794.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		3.320 orang	176.214.600

				ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
							Belanja operasi	: Rp 195.794.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 195.794.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.01 0003		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	KABUPATEN PASURUAN	1 Dokumen		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak		1 Dokumen	100.000

				<i>paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>					<i>Roko</i>			
							<i>Belanja operasi</i>	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							<i>Belanja modal</i>	: Rp -				
							<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -				
							<i>Belanja transfer</i>	: Rp -				
1 05 03 2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%		Rp 1.375.631.760			100%	854.605.756
				Persentase Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Bencana		100%		Rp 1.201.841.760			100%	704.405.756

1 05 03 2.02 0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	KABUPATEN PASURUAN	1 Kegiatan		Rp 88.661.240	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		3 Kegiatan	79.795.116
							Belanja operasi	: Rp 88.661.240				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 88.661.240				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.02 0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	KABUPATEN PASURUAN	252 Unit		Rp 1.236.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		10251 Unit	1.000.000

				<i>kawasan tempat tinggalnya</i>									
							<i>Belanja operasi</i>	: Rp -					
							Belanja pegawai	: Rp -					
							Belanja barang dan jasa	: Rp -					
							Belanja bunga	: Rp -					
							Belanja subsidi	: Rp -					
							Belanja hibah	: Rp -					
							Belanja bantuan sosial	: Rp -					
							<i>Belanja modal</i>	: Rp 1.236.000					
							<i>Belanja tidak terduga</i>	: Rp -					
							<i>Belanja transfer</i>	: Rp -					
1 05 03 2.02 0010		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian	KABUPATEN PASURUAN	1290 Orang		Rp 73.977.600	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		100 Orang	66.579.840	

				operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota								
							Belanja operasi	: Rp 73.977.600				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 73.977.600				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.02 0012		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	KABUPATEN PASURUAN	40 keluarga		Rp 29.812.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		20 keluarga	26.830.800

							Belanja operasi	: Rp 29.812.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 29.812.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.02 0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	KABUPATEN PASURUAN	15 Kawasan		Rp 372.372.800	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k	POKIR	15 Kawasan	30.000.000
							Belanja operasi	: Rp 372.372.800				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp 372.372.800				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.02 0009		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN PASURUAN	1 Dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		3 Dok	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				

							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.02 0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN PASURUAN	1 Dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 Dok	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				

							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.02 0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	KABUPATEN PASURUAN	840 Kawasan		Rp 635.782.120	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k	PENDI DIKAN DAN POKIR	100 Kawasan	500.000.000
							Belanja operasi	: Rp 635.782.120				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 635.782.120				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

			Persentase Pelaksanaan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%		173.790.000			100%	150.200.000
1 05 03 2.02 0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	KABUPATEN PASURUAN	40 Orang		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		50 Orang	100.000
						Belanja operasi	: Rp -				
						Belanja pegawai	: Rp -				
						Belanja barang dan jasa	: Rp -				
						Belanja bunga	: Rp -				
						Belanja subsidi	: Rp -				
						Belanja hibah	: Rp -				
						Belanja bantuan sosial	: Rp -				
						Belanja modal	: Rp -				
						Belanja tidak terduga	: Rp -				
						Belanja transfer	: Rp -				

1 05 03 2.02 0011		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN PASURUAN	1 Dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 Dok	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

1 05 03 2.02 0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	KABUPATEN PASURUAN	12 Laporan		Rp 173.790.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		12 Laporan	150.000.000
							Belanja operasi	: Rp 173.790.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 173.790.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan		100%		590.970.000			100%	424.310.000

		Bencana		Evakuasi Korban Bencana								
1 05 03 2.03 0001		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	KABUPATEN PASURUAN	1 laporan		Rp 1.700.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 laporan	1.530.000
							Belanja operasi	: Rp 1.700.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 1.700.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

1 05 03 2.03 0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	KABUPATEN PASURUAN	3 Dok		Rp 132.820.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		3 Dok	100.000.000
							Belanja operasi	: Rp 132.820.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 132.820.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03 0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	KABUPATEN PASURUAN	1000 orang		Rp 38.500.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak		1000 orang	34.650.000

									Roko k			
							Belanja operasi	: Rp 38.500.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 38.500.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03 0007		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	KABUPATEN PASURUAN	3 Dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		3 Dok	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03 0008		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	KABUPATEN PASURUAN	100 Orang		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		100 Orang	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				

							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03 0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KABUPATEN PASURUAN	100000 Orang		Rp 96.000.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		100000 Orang	86.400.000
							Belanja operasi	: Rp 96.000.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 96.000.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				

							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03 0011		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	KABUPATEN PASURUAN	12 Laporan		Rp 320.250.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		12 Laporan	200.000.000
							Belanja operasi	: Rp 320.250.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 320.250.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				

							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.03 0010		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	KABUPATEN PASURUAN	1 dok		Rp 1.700.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 dok	1.530.000
							Belanja operasi	: Rp 1.700.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 1.700.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04		Penataan Sistem Dasar		Persentase Penataan Sistem Dasar		100%		309.999.700			100%	204.627.730

		Penanggulangan Bencana		Penanggulangan Bencana								
1 05 03 2.04 0001		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	KABUPATEN PASURUAN	1 dok		Rp 1.360.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 dok	1.224.000
							Belanja operasi	: Rp 1.360.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 1.360.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0003		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	KABUPATEN PASURUAN	0 dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak		1 dok	100.000

									Roko k			
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0004		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	KABUPATEN PASURUAN	1 dok		Rp 250.080.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k	POKIR	1 dok	150.000.000
							Belanja operasi	: Rp 250.080.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				

							Belanja barang dan jasa	: Rp 250.080.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0005		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	KABUPATEN PASURUAN	1 laporan		Rp 3.375.000	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Rokok		1 laporan	3.037.500
							Belanja operasi	: Rp 3.375.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 3.375.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				

							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0007		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	KABUPATEN PASURUAN	62 Orang		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		62 Orang	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				

							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0008		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	KABUPATEN PASURUAN	48 Orang		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		48 Orang	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				

							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	KABUPATEN PASURUAN	4 Kegiatan		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		1 Kegiatan	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

1 05 03 2.04 0011		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (lembaga)	KABUPATEN PASURUAN	2 Lembaga		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		2 Lembaga	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				

							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0012		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	KABUPATEN PASURUAN	75 laporan		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		75 laporan	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				

							Belanja transfer	: Rp -				
1 05 03 2.04 0002		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN PASURUAN	1 Dok		Rp 1.360.000	DAU/DAK/DBH/CHT/Pajak Rokok		1 Dok	1.224.000
							Belanja operasi	: Rp 1.360.000				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 1.360.000				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

1 05 03 2.04 0013		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN PASURUAN	4 Dok		Rp 53.824.700	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		2 Dok	48.442.230
							Belanja operasi	: Rp 53.824.700				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp 53.824.700				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				

1 05 03 2.04 0009		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	KABUPATEN PASURUAN	4 Dok		Rp -	DAU/ DAK/ DBH CHT/ Pajak Roko k		4 Dok	100.000
							Belanja operasi	: Rp -				
							Belanja pegawai	: Rp -				
							Belanja barang dan jasa	: Rp -				
							Belanja bunga	: Rp -				
							Belanja subsidi	: Rp -				
							Belanja hibah	: Rp -				
							Belanja bantuan sosial	: Rp -				
							Belanja modal	: Rp -				
							Belanja tidak terduga	: Rp -				
							Belanja transfer	: Rp -				
							Total Belanja PD	Rp6.419.113.00 : 0				5.750.241.425

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

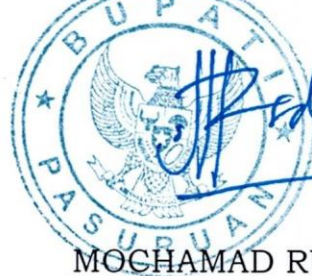
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO